

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, PDRB, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2020**

UMI KALSUM



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, PDRB, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2020

Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

UMI KALSUM

A011181002



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, PDRB, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2020

Disusun dan diajukan oleh :

UMI KALSUM

A011181002

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Makassar, 31 Mei 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®.

Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF

NIP. 196040106 198803 2 001

NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.

NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, PDRB, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2020

disusun dan diajukan oleh:

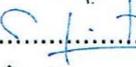
UMI KALSUM

A011181002

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 22 Juni 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si. CSF.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si..	Anggota	3..... 
4.	Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si..	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fatah, SE., M.Si., CSF., CWM®.

NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Umi Kalsum**
Nomor Pokok : A011181002
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, PDRB, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2020** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 24 Juni 2022

Yang Menyatakan



(UMI KALSUM)

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap manusia yang dikehendaki-Nya.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga serta sahabatnya, *tabi'in*, *atba'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan seluruh pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jikalau peneliti mengkhususkan bagian ini hanya untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua peneliti, Bapak Ambo Cimmang dan Ibu Sanadia yang senantiasa memberikan segala yang dimiliki untuk anaknya selama menempuh pendidikan, baik itu dukungan materi maupun non-materi selama peneliti bersekolah hingga kuliah.
2. Dosen pembimbing 1, yaitu Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.

3. Dosen pembimbing 2, yaitu Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
4. Kepada Bapak Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si dan Ibu Dr. Munawwarah S. Mubarak, SE., M.Si. selaku dosen penguji terima kasih untuk segala saran perbaikan dan kritik yang membangun selama ujian seminar proposal dan ujian akhir skripsi. Hal tersebut membuat penulis memperoleh pengetahuan – pengetahuan yang baru.
5. Pihak departemen Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin
7. Kawan-kawan Ilmu Ekonomi 2018 (LANTERN) terima kasih atas setiap momen kebersamaan baik suka maupun duka yang telah dilewati selama masa perkuliahan.
8. Kepada sahabat kuliah yaitu Dania, Dini, Tia, Adel, Cica, dan Nabila terima kasih telah menemani penulis dari mencari judul sampai terselesaikannya skripsi ini dan makasih juga tetap menghibur penulis.
9. Kawan-kawan HIPERMAWA Koperti UNHAS terima kasih atas setiap momen kebersamaan baik suka maupun duka yang telah dilewati diluar perkuliahan.
10. Kepada Haslinda dan Sahrana terima kasih atas support dan bantuan yang kalian berikan dari maba hingga saat ini dan memberikan banyak pembelajaran kepada penulis.

11. Kepada c2pid, yaitu Nisa, Diba, Mayang, dan Shila terima kasih karena sampai saat ini selalu memberikan support systemnya dan selalu menemani penulis diluar perkuliahan.
12. Kepada teman seperjuangan dari SMA, simi-simi yaitu Aing, Nisa, Shila, Kiki dan Enning terima kasih karena sampai saat ini kita semua masih menjalin pertemanan dan saling support satu sama lain.
13. Teman seperjuangan dari SMP, yaitu Wanda, Ayu, Risma, dan Nugli terima kasih karena sampai saat ini kita semua masih menjalin pertemanan dan saling menghibur satu sama lain.
14. Kepada teman KKN posko Wajo 1 Kecamatan Sabbangparu yaitu Nupe, Rana, Lela, Lia dan Nutaam terima kasih menjadi teman seposko seperjuangan di tengah teriknya matahari dan selalu memberikan semangat serta menemani penulis dalam mengurus program kerja penulis.
15. Untuk aplikasi Game Mobile Legend terima kasih karena telah hadir dan memberi warna dalam kehidupan penulis dan setia menghibur penulis disaat stress, membuat penulis jadi semangat dalam perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini.
16. Terima kasih untuk aplikasi TikTok dan Instagram karena telah memberikan banyak konten yang menarik dan edukatif yang membuat penulis merasa terhibur dan mendapatkan banyak pelajaran.
17. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan segala saran serta kritik dari berbagai pihak

demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 22 Juni 2022

UMI KALSUM

ABSTRAK

PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, PDRB, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2000-2020

Umi Kalsum
Fatmawati
Hamrullah

Permasalahan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wajo yaitu masih tingginya jumlah pengangguran yang belum dapat dikurangi karena jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang bekerja khususnya pada sektor perdagangan. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah runtut waktu (*Time Series*) dari tahun 2000-2020. Analisis model menggunakan model regresi linear berganda kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik dan hipotesis, dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum, investasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020..

Kata Kunci: Upah minimum, Investasi, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Penyerapan Tenaga Kerja.

ABSTRACT

THE EFFECT OF MINIMUM WAGE, INVESTMENT, GRDP, AND GOVERNMENT EXPENDITURES ON LABOR ABSORPTION IN THE TRADE SECTOR IN WAJO DISTRICT, 2000-2020

Umi Kalsum
Fatmawati
Hamrullah

The problem of absorption of labor in Wajo Regency is the high number of unemployed that cannot be reduced because the number of the workforce is not balanced with the number of people working, especially in the trade sector. This brings various challenges for local governments in overcoming the problem of labor absorption. This study aims to determine the effect of minimum wages, investment, GRDP, and government expenditure on employment in the trade sector in Wajo Regency. This research uses quantitative methods. The data used is a time series (Time Series) from 2000-2020. Analysis of the model using multiple linear regression models then tested classical assumptions and hypotheses, with the help of SPSS 26. The results showed that the variables of minimum wage, investment, GRDP, and government expenditure had a significant influence on employment in the trade sector in Wajo Regency in 2000.-2020..

Keywords: Minimum Wage, Investment, GDRP, Government Expenditure, and Labor Absorption.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja	10
2.1.1.1 Teori Penawaran Tenaga Kerja.....	10
2.1.2 Upah Minimum.....	11
2.1.2.1 Teori Upah	11
2.1.3 Investasi	12
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto	13
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah	16
2.2 Hubungan Antar Variabel	17
2.2.1 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	17
2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	18
2.2.3 Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	18

2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	19
2.3 Tinjauan Empiris.....	20
2.4 Kerangka Konseptual.....	21
2.5 Hipotesis Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
Metode Analisis Data.....	24
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	25
3.4.2 Pengujian Kriteria Statistik.....	27
2.3 Definisi Operasional.....	28
3.4.1 Variabel Independen.....	28
3.4.1 Variabel Dependen.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	41
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Wajo.....	41
4.1.2 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kabupaten Wajo dari Tahun 2000-2020.....	41
4.2 Perkembangan Umum Variabel Penelitian.....	43
4.2.1 Perkembangan Upah Minimum di Kabupaten Wajo.....	43
4.2.2 Perkembangan Investasi di Kabupaten Wajo.....	45
4.2.3 Perkembangan PDRB di Kabupaten Wajo.....	46
4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Wajo.....	48
4.3 Hasil Estimasi.....	49
4.3.1 Uji Asumsi klasik.....	50
4.3.2 Uji Hipotesis.....	53
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.4.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kabupaten Wajo.....	56
4.4.2 Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kabupaten Wajo.....	58
4.4.3 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kabupaten Wajo.....	59

4.4.4 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan di Kabupaten Wajo	61
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020 ..	3
Tabel 1.2 Penduduk Kabupaten Wajo Berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Sektor Perdagangan Tahun 2010-2020	5
Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Wajo Berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Sektor Perdagangan Tahun 2000-2020	47
Tabel 4.2 Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2020	44
Tabel 4.3 Realisasi Investasi Kabupaten Wajo Sektor Perdagangan Tahun 2000-2020	46
Tabel 4.4 PDRB Kabupaten Wajo Tahun 2000 Sektor Perdagangan Tahun 2000-2020.....	47
Tabel 4.5 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wajo Sektor Perdagangan Tahun 2000-2020.....	49
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.8 Uji t (Uji Parsial)	53
Tabel 4.9 Uji f (Uji Simultan)	55
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	3
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	50
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020.....	69
Lampiran 2 Uji Asumsi Klasik.....	70
Lampiran 3 Hasil Estimasi Data.....	72
Lampiran 4 Biodata.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun dalam mencapainya sering dihadapkan pada masalah-masalah pokok yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi antar daerah (Lestariningsih, 2006). Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, akan meningkatkan beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) termasuk salah satu faktor penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Penyediaan lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga mutlak diperlukan karena merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk bisa terserap di berbagai sektor ekonomi dan menciptakan tenaga kerja yang efektif.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan makroekonomi. Dilihat dari dimensi regional beberapa permasalahan pengangguran adalah tidak adanya konvergensi dari tingkat pengangguran provinsi maupun kabupaten atau kota menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Kabupaten Wajo sendiri tercatat sebagai salah satu kabupaten yang berada pada urutan kelima dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 proyeksi penduduk sebanyak 379.080 jiwa. Berdasarkan kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja 210.059 jiwa dan bukan angkatan kerja 115.199. Selanjutnya dari angkatan kerja tersebut terdapat penduduk bekerja sebanyak 193.199 dan pengangguran 16.860 jiwa. Data BPS Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk naik sebesar 2.407 jiwa dan angkatan kerja sendiri naik sebanyak 19.974 jiwa. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Wajo untuk terus melakukan berbagai upaya dan kebijakan di berbagai sektor khususnya sektor perdagangan yang berpotensi untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas agar bisa menciptakan keseimbangan antara para pencari

kerja dan kesempatan kerja. Berikut tabel keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Wajo :

Tabel 1.1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Penduduk Yang Bekerja (Jiwa)	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)
2010	115.430	111.996	3.434
2011	117.942	113.828	4.114
2012	125.697	120.250	5.447
2013	128.850	122.668	6.182
2014	135.040	127.742	7.298
2015	153.420	145.356	8.064
2016	162.348	153.162	9.186
2017	177.301	166.741	10.560
2018	185.428	176.207	9.221
2019	190.085	175.305	14.780
2020	210.059	193.199	16.860

Sumber: Badan Pusat Statistik Wajo 2020

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 berisi data tentang kondisi perkembangan ketenagakerjaan secara umum Kabupaten Wajo tahun 2010-2020. Pada tahun 2010 penduduk yang bekerja mencapai 111.996 jiwa sedangkan angkatan kerja sebesar 115.430 jiwa. Jumlah angkatan kerja terus mengalami peningkatan tiap tahunnya disusul jumlah penduduk yang bekerja yang terus berada di bawah jumlah angkatan kerja. Sedangkan untuk jumlah pengangguran dari tahun 2010-2017 terus meningkat tetapi pada tahun 2018 jumlah pengangguran mengalami penurunan yaitu sebesar 9.221 jiwa. Pada tahun 2019-2020 jumlah pengangguran kembali meningkat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan di Kabupaten Wajo. Hal ini terlihat pada angka penduduk bekerja masih di bawah angka jumlah angkatan kerja atau peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang baik sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang juga ikut meningkat.

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Kabupaten Wajo seharusnya juga diikuti oleh kemampuan masing-masing sektor untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja Kabupaten Wajo. Perkembangan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peranan wilayah atau daerah (Faisal Rifai, 2017). Penyerapan tenaga kerja akan meningkat apabila sektor-sektor ekonomi antara lain pertanian, pertambangan, industri, listrik dan air, konstruksi, perdagangan, komunikasi, keuangan, dan jasa saling menunjang satu dengan yang lainnya. Maka dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan diperlukan adanya sektor-sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja (Yuniarto, 2015). Salah satunya adalah sektor perdagangan.

Sektor perdagangan dianggap sebagai perintis dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam hal keberhasilan sebuah pembangunan. Dengan adanya pembangunan sektor perdagangan maka diharapkan akan dapat memicu sektor lainnya seperti pertanian dan sektor industri. Keadaan tersebut mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Komposisi tenaga kerja menggambarkan perbandingan jumlah tenaga kerja di suatu sektor tertentu terhadap seluruh tenaga kerja. Kabupaten Wajo salah satu daerah yang selain mengandalkan hasil pertanian, juga sangat mengandalkan hasil perdagangannya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Penduduk Kabupaten Wajo Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Perdagangan Tahun 2010-2020 (jiwa/orang)

TAHUN	JUMLAH TENAGA KERJA
2010	28.214
2011	29.734
2012	31.156
2013	32.808
2014	34.198
2015	35.588
2016	36.838
2017	38.488
2018	44.048
2019	42.738
2020	40.176

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wajo 2020

Pada Tabel 1.2 menunjukkan jumlah tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo pada tahun 2010-2018 terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2019-2020 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan. Adapun jumlah tenaga kerja sampai tahun 2020 mencapai 40.176 jiwa. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo cenderung meningkat. Akan tetapi jumlah penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri. Berdasarkan data BPS Kabupaten Wajo pada tahun 2020 didominasi oleh sektor pertanian dan sektor industri, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 45% dan sektor industri sebesar 37,56%. Selebihnya yakni sektor perdagangan sebesar 17,12% dari total angkatan kerja yang bekerja.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Upah yang ditetapkan pada suatu wilayah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja

atau dengan kata lain akan mempengaruhi pengangguran di wilayah tersebut. Upah minimum dapat meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, di mana pengusaha individu memiliki tingkat kekuasaan penetapan upah atas pasar secara keseluruhan. Upah minimum meningkatkan kelayakan hidup para pekerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi ketidaksamaan, dan meningkatkan moral.

Variabel lain yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2012). Dengan begitu, adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009)

Indikator perekonomian suatu wilayah dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2010). PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau produksi dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat.

Tenaga kerja pada berbagai dimensinya masih menjadi suatu beban persoalan dalam sistem perekonomian. Pengeluaran pemerintah (government

expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian Indonesia dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompakan suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (Heilbroner, 1982). Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat.

Hal yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah di Kabupaten Wajo. Namun, sampai saat ini pembangunan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat krusial. Ada beberapa faktor yang secara simultan dan kompleks saling berpengaruh di dalamnya, sehingga penelitian ini masih menarik untuk diteliti. Fakta bahwa tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Kabupaten Wajo terjadi karena jumlah penduduk meningkat tiap tahunnya, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja masih masih di bawah jumlah angkatan kerja sehingga menimbulkan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal. Dengan adanya peningkatan upah minimum, investasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah harusnya dapat menjawab permasalahan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat melihat pengaruh dari upah minimum, investasi, PDRB, dan

pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020.
2. Mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020.
3. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk memahami dan mengetahui apakah upah minimum, investasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo Tahun 2000-2020.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti yang tertarik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2003).

Penyerapan tenaga kerja merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

2.1.1.1 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (leisure). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Seorang hanya mau melakukan suatu pekerjaan apabila memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan (G.S Becker,1976).

2.1.2 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah. Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat tingkat penawaran tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan.

2.1.2.1 Teori Upah

Teori Neo Klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan oleh tenaga kerja, dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori Neo Klasik didasarkan pada nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawannya. Teori upah menurut Karl Marx, sistem pengupahan di suatu negara didasarkan pada filsafah atau sistem perekonomian tersebut. Teori yang

mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, (1) menurut Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dan pelaksanaan berdasarkan pandangan Karl Marx dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang jumlahnya hampir sama, pada nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah setiap orang kira-kira sama.
2. Sistem pengupahan memberikan insentif yang perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
3. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang yang benar-benar mau bekerja menurut kemampuannya.

2.1.3 Investasi

Investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang (Lypsey,1997).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno,2000). Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

manusia, maka negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Pada dasarnya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggulirkan program-program investasi yang padat karya yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja. Bukan lebih berpihak pada pengembangan investasi di sektor (jasa) yang padat modal dan minim tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang seharusnya diikuti dengan menurunnya pengangguran tidak terjadi.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (1 tahun). Sedangkan unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik, Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

- 6) Kontruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estat
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen permintaan akhir tersebut meliputi :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan stok
- 5) Ekspor netto (expor dikurangi impor)

c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen balas

jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total daerah atas output barang dan jasa. PDRB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam satuan nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2007).

Tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan output selama siklus bisnis. PDB riil harus tumbuh secepat PDB potensial untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat. PDB harus tetap melaju untuk menjaga tingkat pengangguran stabil. Jika pengangguran ingin diturunkan, PDB sebenarnya harus tumbuh lebih cepat dari PDB potensial (Mankiw, 2007). Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah yang bekerja oleh karena itu hubungan antara jumlah output dengan penyerapan tenaga kerja adalah apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada (Wicaksono, 2010).

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Sukirno,2000).

Kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran agregat. Langkah tersebut akan menaikkan PDRB dan tingkat penggunaan tenaga kerja, sebagaimana yang tertera pada persamaan PDRB dengan pendekatan pengeluaran. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan ini akan menambah kesempatan kerja.

Akibat pengeluaran pemerintah meningkat, pengeluaran yang direncanakan juga mengalami peningkatan. Namun, ada keterbatasan barang dan jasa yang terproduksi. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan output agar produknya dapat sesuai untuk memenuhi rencana pengeluaran. Untuk meningkatkan output, perusahaan akan membutuhkan pekerja lebih banyak sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003).

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah

(*government expenditure*) meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2006), yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Salah satu fungsi pokok kebijakan anggaran belanja negara adalah fungsi stabilisasi. Termasuk ke dalam fungsi stabilisasi ialah tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Reksoprayitno, 2009).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Kenaikan upah akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Dengan adanya penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan dampak terhadap besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada. Keseimbangan antara besarnya upah dan jumlah tenaga kerja tercapai saat upah minimum meningkat maka mendorong para pekerja untuk bekerja sesuai dengan tawaran waktu yang diberikan oleh sebuah perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Lube, 2021) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dinilai berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, sebab itu naiknya daya beli masyarakat akan berdampak pada meningkatnya tingkat produksi perusahaan, sehingga pada tahap akhir pengusaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi.

2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja. Perekonomian selalu berusaha mencapai kondisi optimal maka penambahan penggunaan *capital* melalui kegiatan investasi, yang berarti meningkatnya kapasitas produksi itu, akan meningkatkan pula pengguna tenaga kerja yang selanjutnya secara bersama-sama menaikkan tingkat output maksimum yang mungkin dicapai.

Dengan adanya peningkatan investasi pada suatu perusahaan, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan akan meningkatkan jumlah output yang akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2012), dengan judul penelitian Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mbele Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Di mana variabel investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.2.3 Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Teori lain dimana menurut Keynes dalam Boediono (1992) bahwa pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik hal ini dapat dikaitkan

dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa kenaikan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ziyadaturrofiqoh, 2013), yang berjudul Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi. Variabel PDRB berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input produksi salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah seperti membangun jalan, sekolah, atau fasilitas lain umumnya bersifat padat karya sehingga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2016), yang berjudul Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.3 Tinjauan Empiris

Felber Lube, Josep Bintang Kalangi, Krest D. Tolosang (2021), membahas tentang “Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung”. Adapun hasil penelitiannya yaitu, variabel upah minimum kota memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik regional bruto tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung.

Riky Eka Putra (2012), membahas tentang “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” Adapun hasil penelitiannya yaitu, bahwa secara parsial maupun simultan variabel nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Ziyadaturrofiqoh (2018), membahas tentang “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi”. Adapun hasil penelitiannya yaitu secara simultan variabel PDRB, upah minimum provinsi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Pratama, B. A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil penelitiannya yaitu PDRB dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pengeluaran pemerintah

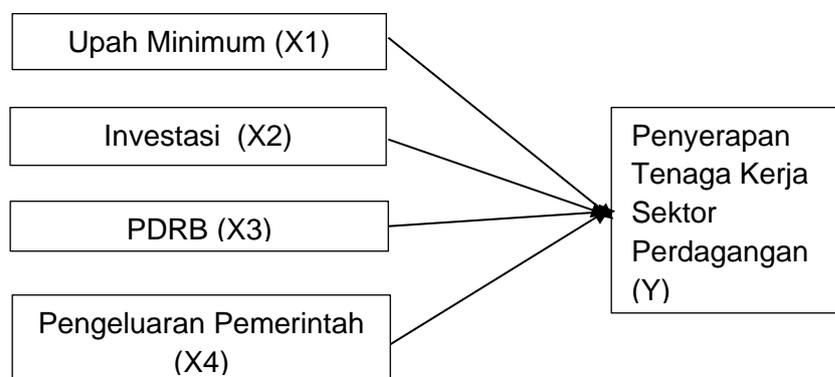
perpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo.

Richat Tri Laksono (2016), membahas tentang “Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember” Adapun hasil penelitiannya yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian pengaruh upah minimum, investasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan di Kabupaten Wajo pada tahun 2000-2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (1) upah minimum, (2) investasi, (3) PDRB, (4) pengeluaran pemerintah. Variabel-variabel tersebut akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang sebelumnya sudah dipaparkan.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, Gambar 2.1 dibawah adalah kerangka pikir yang berfungsi sebagai acuan untuk mencerminkan pola pikir yang digunakan dan perumusan hipotesis sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa upah minimum, investasi, PDRB, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020.
2. Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020.
3. PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020.
4. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan di Kabupaten Wajo tahun 2000-2020.